

BAB II

KERJASAMA USAID DAN PEMERINTAH ETHIOPIA

Di dalam Bab ini, penulis menguraikan mengenai latar belakang USAID dan Ethiopia baik dalam konteks sosial-politik maupun pembangunan. Kemudian penulis juga menguraikan pergeseran prioritas USAID secara global dan domestik terutama di Ethiopia yang secara langsung sangat mempengaruhi kepentingan bantuan luar negeri yang masuk ke Ethiopia. Selanjutnya penulis juga menguraikan mengenai peran USAID dalam pembangunan di Ethiopia, khususnya dalam program *Villagization* yang menuai banyak kontroversi dari berbagai laporan yang dipublikasikan NGOs, baik NGOs pembangunan maupun HAM.

A. Latar Belakang USAID



Gambar 1. Logo USAID

Sumber: www.usaid.gov/branding (diakses pada 14 Januari 2017)

United States Agency for International Development (USAID) hadir sebagai lembaga bantuan luar negeri Amerika Serikat (AS) pertama yang memiliki tujuan jangka panjang pada upaya-upaya pembangunan

sosial dan ekonomi. Kehadirannya memberi kemudahan AS untuk mengalokasikan bantuan luar negerinya ke negara-negara berkembang maupun kurang berkembang. USAID menjembatani lembaga-lembaga AS yang berkaitan dengan upaya implementasi AS dalam hal kebijakan bantuan luar negeri. USAID menggabungkan kegiatan bantuan finansial dan teknis dari *International Cooperation Agency*, kegiatan pinjaman dari *Development Loan Fund*, fungsi-fungsi mata uang lokal dari *Export-Import Bank*, dan kegiatan distribusi surplus hasil pertanian dari program *Food for Peace* dari Departemen Pertanian.

A.1 Tinjauan Historis

Eksistensi AS dalam ranah pembangunan internasional diawali dengan keberhasilan program *Marshal Plan* dalam membantu restrukturisasi perekonomian negara-negara Eropa yang hancur pasca Perang Dunia II. Setelah program *Marshal Plan* selesai pada tahun 1951, Kongres meloloskan *Mutual Security Act* pertama dan membentuk *Mutual Security Agency* sebagai komitmen baru AS untuk berperan lebih besar dalam dunia pembangunan internasional. Undang-undang tersebut menyatukan antara bantuan teknis dengan program ekonomi dan militer. Kemudian pada tahun 1953, *Foreign Operations Administration* didirikan sebagai lembaga pemerintah yang independen di luar Departemen Luar Negeri. Lembaga ini bertugas mengkonsolidasikan bantuan ekonomi dan

teknis di seluruh dunia. Satu tahun kemudian tanggung jawabnya dimerger menjadi *International Cooperation Administration (ICA)*.²⁵

ICA mengatur bantuan untuk tujuan pembangunan ekonomi, politik, dan sosial. Meskipun fungsi ICA hampir mirip dengan USAID, ICA memiliki banyak keterbatasan. Sebagai bagian dari Departemen Luar Negeri AS, ICA tidak memiliki tingkat otonomi seperti yang dimiliki USAID di tahun 90an. Sedangkan pada saat itu, donor multilateral memainkan peran lebih besar dalam penyaluran bantuan asing.²⁶

Revisi *Mutual Security Act* 1954 yang disetujui Kongres kemudian memperkenalkan konsep bantuan pembangunan, bantuan keamanan, dana kontingensi diskresioner, dan jaminan investasi swasta. Program *Food for Peace* diimplementasikan tahun itu, dan sekaligus memperkenalkan apa yang kemudian dikenal sebagai bantuan pangan. Tiga tahun kemudian Kongres kembali menyetujui revisi *Mutual Security Act* (1957) yang mengarah pada pembentukan *Development Loan Fund (DLF)* yang bertindak sebagai tangan kanan lembaga pinjaman ICA. Fungsi utama DLF adalah untuk memperpanjang pinjaman dari nasabah-nasabah yang tidak diminati oleh *Export Import Bank* atau pendonor lainnya. DLF membiayai segala sesuatu selain bantuan teknis, tapi yang paling penting untuk membiayai modal proyek-proyek pembangunan.²⁷ Baik ICA dan DLF, keduanya ditujukan untuk kebutuhan program pembangunan luar

²⁵ Rachel M. McCleary, *Global Compassion : Private Voluntary Organizations and U.S. Foreign Policy since 1939*, Oxford University Press, New York, 2009, hal.89.

²⁶ *Ibid.*, hal.90.

²⁷ *Ibid.*

negeri jangka panjang. Hal itu lah yang kemudian mendorong terbentuknya USAID.

A.2 Konteks Kelahiran USAID

Pada tahun 1960, tiga lembaga yang menjadi penggerak bantuan luar negeri AS (ICA, DLF, *Export Import Bank*) itu kemudian dianggap kurang mampu memenuhi tujuan pembangunan AS. Selain itu juga terjadi kemerosotan kelembagaan, sehingga Pemerintah AS mulai mengatur ulang kembali kebijakan bantuan luar negerinya.²⁸ Akhirnya Pemerintah AS menyatukan ketiga lembaga bantuan luar negeri tersebut dalam satu lembaga baru yang bernama *United States Agency for International Development* (USAID) melalui pengesahan Undang-Undang Bantuan Luar Negeri (*Foreign Assistance Act*).

UU Bantuan Luar Negeri ditandatangani Presiden John F. Kennedy pada tahun 1961, dan menjadi pondasi bagi berdirinya USAID. Sejak dibentuknya, USAID kemudian menjadi lembaga bantuan luar negeri AS pertama yang memiliki tujuan utama pada bantuan ekonomi dan sosial jangka panjang. USAID juga independen sehingga terpisah dari fungsi-fungsi politik dan militer yang dulu acap kali mewarnai lembaga-lembaga

²⁸ Samuel Hale Butterfield, *U.S. Development Aid-an Historic First : Achievments and Failures in the Twentieth Century*, Praeger, London, 2004, Hal.26.

bantuan luar negeri AS. Selain itu, USAID juga mampu menawarkan bantuan langsung ke negara-negara berkembang di dunia.²⁹

A.3 Pergeseran Prioritas

Seiring munculnya permasalahan dan berkembangnya isu-isu yang ada di luar negeri, khususnya di negara-negara berkembang yang merupakan tempat tujuan disalurkan bantuan tersebut. Tujuan-tujuan pembangunan USAID pun disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi. Tahun 1970an, bantuan luar negeri USAID lebih banyak berfokus pada kebutuhan dasar manusia. Diantaranya seperti pendidikan, kesehatan, pertumbuhan penduduk, makanan dan nutrisi, serta pengembangan sumber daya manusia.³⁰

Tahun 1980an, USAID kembali mengubah fokus tujuannya ketika terjadi krisis ekonomi di negara-negara berkembang. Dengan munculnya isu tersebut, USAID berupaya memberikan bantuan guna menstabilkan mata uang dan sistem keuangan. Untuk dapat merealisasikan tujuan itu, USAID kembali menegaskan komitmennya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis luas, menekankan peluang kerja dan pendapatan melalui revitalisasi pertanian dan perluasan pasar domestik. Dalam dekade ini, kegiatan pembangunan lebih sering disalurkan melalui

²⁹ Caitlin Zusy, *History of USAID*, Borgen Project, diakses dari <https://borgenproject.org/history-of-usaid/>, pada tanggal 14 Januari 2017.

³⁰ "A History of Foreign Assistance," USAID, diunduh dari pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnacp064.pdf, pada tanggal 14 Januari 2017.

organisasi-organisasi sukarela swasta, dan bantuan bergeser dari proyek individu menjadi program besar.³¹ Pada tahun tersebut, bantuan yang disalurkan USAID juga banyak dipengaruhi oleh kepentingan nasional AS terkait strateginya membendung komunisme.

Prioritas utama USAID kembali bergeser pada tahun 1990an, dimana isu-isu mengenai demokrasi dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) mulai menjadi perhatian USAID. Lembaga bantuan AS ini mulai memberikan bantuan dengan pendekatan yang lebih mengedepankan kemandirian dengan tujuan negara yang mendapat bantuan dapat meningkatkan kualitas hidup mereka sendiri. Selama dekade ini, USAID menyesuaikan program bantuan pembangunan terhadap kondisi ekonomi suatu negara yang dituju. Sehingga USAID mulai menyediakan paket bantuan terpadu ke negara-negara berkembang, negara-negara transisi menerima bantuan di saat krisis, sedangkan negara-negara dengan keberadaan bantuan USAID yang terbatas akan menerima dukungan melalui LSM. Selain itu, USAID juga memainkan peran utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan setelah jatuhnya Tembok Berlin pada tahun 1989. Program-program USAID itu menciptakan fungsi demokrasi secara terbuka dengan sistem ekonomi berorientasi pasar dan sistem perlindungan sosial yang responsif.³²

Tahun 2000an, tahun dimana isu terorisme dan invasi AS ke negara-negara terduga pelindung teroris mewarnai ranah hubungan

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

internasional juga mempengaruhi prioritas USAID dalam pembangunan dan bantuan luar negeri. Pada dekade ini, USAID lebih terfokus pada perang dan pembangunan kembali (*war and rebuilding*). Dengan adanya perang di Afghanistan dan Irak, USAID diperintahkan pemerintah AS untuk membantu kedua negara itu membangun kembali pemerintahan, infrastruktur, masyarakat sipil dan pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. USAID juga mulai membangun kembali dengan pengawasan ketat supaya mendapatkan hasil yang maksimal dari anggaran yang telah dialokasikan. Selain itu, USAID juga telah memulai menjangkau lembaga-lembaga swasta untuk membantu mendapatkan anggaran sebanyak mungkin.³³

Saat ini, USAID beroperasi di lebih dari 100 negara di seluruh dunia dengan tujuan yang sama seperti apa yang dikatakan Presiden Kennedy 50 tahun yang lalu. Dimana selain melanjutkan kepentingan kebijakan luar negeri AS dalam hal memperluas demokrasi dan pasar bebas, USAID juga harus mengulurkan tangan untuk membantu orang berjuang mendapatkan kehidupan yang lebih baik, pulih dari bencana, atau membantu mereka yang berjuang untuk hidup dalam masyarakat demokratis yang bebas.

³³ *Ibid.*

B. Latar Belakang Ethiopia



Gambar 2. Bendera Nasional Republik Demokratik Federal Ethiopia
Sumber: flagspot.net/images/e/et.gif (Diakses pada 14 Januari 2017)

B.1 Letak Geografis dan Kependudukan

Ethiopia terletak di kawasan Tanduk Afrika yang berada di semenanjung timur laut benua Afrika.³⁴ Ethiopia berbatasan langsung dengan 6 negara, yaitu Eritrea di utara dan timur laut, Djibouti dan Somalia di timur, Kenya di Selatan, serta Sudan dan Sudan Selatan di barat. Luas wilayah Ethiopia mencapai 1.104.300 km² dengan elevasi di Ethiopia meliputi berbagai macam ketinggian, dari 100 meter dibawah permukaan laut di perbatasan timur laut hingga lebih dari 4000 meter diatas permukaan laut di kawasan pegunungan. Secara topografi Ethiopia dibagi menjadi tiga zona, diantaranya *daga* (dataran tinggi yang dingin, dimana suhu rata-rata tahunannya sekitar 16 derajat celcius), *wayna daga* (zona menengah, tempat dimana sebagian besar kehidupan penduduk menetap), dan *qolla* (lembah dan dataran panas, yangmana iklim panas atau dinginnya tergantung pada kondisi padang pasir dari ujung timur laut Lembah Rift).³⁵

³⁴ Tanduk Afrika (*Horn of Africa*) adalah semenanjung di Afrika Timur yang mencakup kawasan empat negara yaitu Eritrea, Ethiopia, Somalia, dan Djibouti. Lihat Sidik Jatmika, *Hubungan Internasional di Kawasan Afrika*, Samudra Biru, Bantul, 2016, hal.63-64.

³⁵ Saheed A. Adejumboi, *The History of Ethiopia*, Greenwood, Westport, 2007, hal.5.

Perbedaan elevasi di sekitar Ethiopia itu mengakibatkan kondisi temperatur menjadi bervariasi dan secara langsung melahirkan kelompok-kelompok masyarakat dengan adat, budaya dan cara hidup yang berbeda-beda. Musim tanam di Ethiopia berlangsung saat *keramt* (musim hujan lebat) antara bulan Juni hingga September, dan saat *balg* (musim hujan rendah) antara Maret dan Mei. Namun bagaimanapun musimnya, tanah di Ethiopia rentan terhadap kekeringan terutama di kawasan pastoral³⁶ sepanjang tahun.

Jumlah populasi di Ethiopia adalah yang tertinggi di Kawasan Tanduk Afrika. Terdapat 93.877.025 juta penduduk tinggal di Ethiopia, dengan persebaran kelompok etnis Oromo 35%, Amhara 27%, Somali 6%, Tigray 6%, Sidamo 4%, dan etnis lainnya 22%. Sedangkan persebaran agama di Ethiopia meliputi Ortodoks Ethiopia 44%, Muslim 34%, Protestan 19%, dan lain-lain 3%. Yang menarik adalah bahwa sebagian besar dari total populasi di Ethiopia adalah anak muda, dengan usia rata-rata baik pria maupun wanita berumur 17 tahun. Selain itu, bahasa Oromo dan Amhara adalah bahasa lisan yang paling umum digunakan.³⁷

³⁶ Istilah Kawasan Pastoral merujuk pada kawasan yang penggunaannya dan pengelolaan sumber dayanya untuk kepentingan peternakan. Lihat Gerard Ciparisse, *Multilingual Thesaurus on Land Tenure (English Version)*, FAO/UN, Roma, 2003, Hal.158.

³⁷ Central Intelligence Agency, *The World Fact Book 2016-2017: Ethiopia*, Washington, D.C., 2016, diakses dari <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/et.html>, pada tanggal 15 Januari 2017.

B.2 Sejarah dan Dinamika Sosial-Politik

Ethiopia adalah negara merdeka tertua di Afrika, dengan sejarah pemerintahan yang mayoritas monarkis selama lebih dari 2000 tahun sejak kekuasaan dipegang Kerajaan Aksum. Kristen Koptik diperkenalkan orang Mesir pada abad keempat, dan pada abad ke-15 pemimpin Muslim Ahmad Gran menaklukkan sebagian besar Ethiopia. Setelah serangkaian pergeseran kekuasaan selama abad ke-19, Kaisar Menelik II mengambil alih dan memimpin negara melewati sejarah invasi Italia di tahun 1895. Tentara Ethiopia mengalahkan Italia, yang kemudian memberi kesempatan Ethiopia untuk diakui sebagai negara merdeka. Pada tahun 1930, pemimpin Ras Tafari Makonnen (yang kemudian disebut Kaisar Haile Selassie I) berkuasa. Pada tahun 1935, selama Perang Dunia II, Italia berusaha melakukan invasi kedua dan berhasil menduduki Addis Ababa pada tahun 1936, dan menyingkirkan Selassie dalam sementara waktu. Segera setelah itu, *Italia East Africa* dibentuk, menggabungkan tiga negara yang terpisah – Ethiopia, Eritrea dan *Italian Somaliland*. Ethiopia kemudian melakukan perlawanan dengan banyak dibantu oleh tentara Inggris, dan mampu mengalahkan Italia yang berkuasa serta mengembalikan kekuasaan Selassie pada tahun 1941. Selassie terus memerintah Ethiopia, hingga akhirnya digulingkan oleh kudeta militer pimpinan Jendral Terefi Benti pada tahun 1974.³⁸

³⁸ “*Ethiopia Profile*,” BBC, diakses dari <http://www.bbc.com/news/world-africa-13351397>, pada tanggal 16 Januari 2017.

Di tahun 1977, Benti dibunuh dan kepemimpinan digantikan oleh Kolonel Mengistu Haile Mariam, seorang diktator Marxis. Mengistu bertanggung jawab atas kematian ribuan oposisi Pemerintah selama kampanye pembunuhan massal yang dikenal sebagai “Red Terror” antara tahun 1977 sampai 1979. Selama Rezim Derg – pimpinan Kolonel Mengistu – berada ditampuk kekuasaan, bantuan dari AS dihentikan dan kala itu masuklah bantuan dari Uni Soviet dan Kuba. Bahkan dalam invasinya terhadap wilayah-wilayah Somalia dan Eritrea, Uni Soviet dan Kuba juga memberikan dukungan serta bantuan. Pada tahun 1987, Mengistu barulah secara resmi terpilih sebagai presiden di bawah konstitusi baru. Dan di tahun 1988, Ethiopia dan Somalia menandatangani perjanjian damai.³⁹

Pada tahun 1991, sebuah kelompok bernama Front Demokrasi Revolusioner Rakyat Ethiopia menduduki ibukota hingga menyebabkan Mengistu tergeser dari tampuk kekuasaannya. Selain itu Front Pembebasan Rakyat Eritrea juga muncul mengambil kendali provinsi Eritrea. Kemudian dua kelompok tersebut sepakat untuk sama-sama menghormati masing-masing kedaulatan wilayahnya, dan Eritrea mendapatkan kemerdekaannya pada tahun 1993.⁴⁰ Walau demikian, konflik antara kedua negara ini tidak lantas berhenti dan malah membuat situasi di kawasan Tanduk Afrika semakin tidak kondusif.

³⁹ Sidik Jatmika, *op.cit.*, hal.66.

⁴⁰ Ibid.

Memasuki abad 21, kondisi politik Ethiopia sudah cukup stabil tanpa ada lagi kudeta. Walau ketegangan terkait konflik perbatasan dengan Eritrea masih terus terjadi, dunia internasional lebih menyorot persoalan domestik Ethiopia terkait bencana kekeringan, kelangkaan pangan, dan kelaparan. Perhatian dunia internasional semakin meningkat pada tahun 2000 ketika Ethiopia mengalami bencana kekeringan yang menyebabkan 8 juta penduduk menderita kelaparan. Bencana itu kemudian mendorong berbagai lembaga-lembaga donor internasional memberikan bantuan finansial maupun teknis pada Ethiopia supaya dapat pulih dan dapat mengatasi bencana yang sewaktu-waktu dapat datang mengancam.

B.3 Ethiopia dalam Pembangunan Abad 21

Walaupun sering mengalami bencana kekeringan dan kelaparan, serta lekat dengan stigma kemiskinan, Ethiopia disebut-sebut sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Selama tahun 2004-2014, *World Bank* mencatat perekonomian Ethiopia adalah yang terkuat di wilayah Tanduk Afrika dengan pertumbuhan PDB sebesar 10,9%.⁴¹ Mayoritas pendapatan negara Ethiopia didapat dari produksi sektor pertanian, dimana sektor ini berkontribusi dalam pemasukan negara sebesar 46% dan menyerap tenaga kerja sebesar 85%. Tetapi Pemerintah Ethiopia menilai sektor pertanian masih rentan untuk menopang

⁴¹ “*With Continued Rapid Growth, Ethiopia is Poised to Become a Middle Income Country by 2025*,” World Bank, diakses dari <http://www.worldbank.org/en/country/ethiopia/publication/ethiopia-great-run-growth-acceleration-how-to-pace-it>, pada tanggal 10 Februari 2017.

berlangsungnya pertumbuhan ekonomi, dikarenakan bencana kekeringan yang sulit diatasi, infrastruktur yang masih kurang memadai, dan metode budidaya dibawah standar yang masih sering terjadi.⁴²

Pemerintah Ethiopia pun berupaya memperkuat pertumbuhan ekonomi melalui penguatan sektor pertanian dengan cara melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga donor dan investor asing untuk mewujudkan modernisasi pertanian. Upaya tersebut kemudian mencoba direalisasikan Pemerintah Ethiopia melalui rencana pembangunan lima tahun *Growth Transformation Plan* (GTP) 2010/2011-2014/2015 yang anggarannya banyak mendapat bantuan dari lembaga donor asing, salah satunya USAID.

C. Eksistensi USAID di Ethiopia

C.1 Tinjauan Historis

Sejak terbentuknya USAID pada tahun 1961, Ethiopia telah mendapatkan bantuan pembangunan dari lembaga donor yang merepresentasikan warga negara Amerika Serikat (AS) ini. AS menganggap kemitraan dengan Ethiopia sangatlah penting, karena salah satu pangkalan militer AS yaitu *Kagnew Station* saat itu berada di Amara.⁴³ Sehingga kerjasama non-militer juga dilakukan AS untuk menjaga kemitraan itu. Pada tahun 1960an, bantuan luar negeri USAID di

⁴² Central Intelligence Agency, *op.cit.*

⁴³ *Kagnew Station* adalah pangkalan komunikasi intelejen AS di Amara yang sangat penting bagi kekuatan militer AS selama Perang Dingin. Lihat Getachew Metaferia, *Ethiopia and the Unites States: history, diplomacy, and analysis*, Algora, New York, 2009, hal.49.

Ethiopia mayoritas digunakan untuk mengembangkan sektor pertanian dan tujuan utamanya adalah meningkatkan kapasitas tenaga kerja yang kurang memadai dengan meningkatkan pendidikan umum dan pelatihan keterampilan yang dibutuhkan di lapangan kerja. Selain itu USAID juga menargetkan peningkatan pendapatan negara yang kurang memadai dengan meningkatkan pendapatan yang didapat dari aktivitas perekonomian yang berkonsentrasi pada kegiatan yang menghasilkan pendapatan dari bidang pertanian dan industri terkait.⁴⁴

USAID melaporkan pernah terjadi dua kali peningkatan alokasi bantuan ke Ethiopia yang signifikan, yaitu pada tahun 1973 dan 1993. Kedua peningkatan bantuan itu terjadi karena sebab yang sama, yaitu karena terjadi bencana kekeringan yang lantas menyebabkan kelangkaan pangan lalu kelaparan. Tahun 1973 adalah tahun pertama Ethiopia mendapat bantuan cukup signifikan dari USAID karena bencana kekeringan. Walau pada awalnya bantuan berfokus pada pendidikan dan pembangunan penduduk di pedesaan, pemulihan kondisi pasca bencana ini cukup mempengaruhi jumlah bantuan yang kemudian masuk ke Ethiopia.

Pada dekade selanjutnya, USAID menarik bantuan dari Ethiopia akibat sanksi yang dijatuhkan pemerintah AS pada Ethiopia karena rezim Derg yang berkuasa menyatakan Ethiopia sebagai negara sosialis dan bersekutu dengan Uni Soviet.⁴⁵ Padahal pada tahun 1980an itu, Ethiopia juga tengah mengalami bencana kekeringan dan kelaparan yang cukup

⁴⁴ “*History of USAID in Ethiopia*,” USAID, diakses dari <https://www.usaid.gov/ethiopia/history-usaid-ethiopia>, pada tanggal 27 Januari 2017.

⁴⁵ *Ibid.*

mengkhawatirkan. Bencana tersebut menyebabkan 400.000 penduduk meninggal dunia.⁴⁶ Setelah rezim Derg digulingkan pada tahun 1991 dan sanksi dicabut, barulah USAID kembali hadir dan memberikan bantuan pembangunan ke Ethiopia pada tahun 1993.

C.2 Eskalasi Bantuan USAID

Bantuan USAID yang masuk ke Ethiopia dari tahun 1961 sampai tahun 2000 terpantau selalu fluktuatif. Bahkan pernah terjadi pemberhentian penyaluran bantuan selama tahun 1981 sampai 1992. Tahun 2002/2003 menjadi batu loncatan awal dimana bantuan USAID meningkat hingga 606 juta dolar dan terus menunjukkan jumlah yang stabil hingga tahun 2015. Terhitung selama satu dekade antara 2003-2013, bantuan USAID yang masuk ke Ethiopia rata-rata berjumlah 500 juta dolar AS (lihat gambar 3).⁴⁷ Di abad 21 ini, bantuan luar negeri USAID untuk Ethiopia tidak hanya terfokus terkait pembangunan sosial, ekonomi dan penanganan bencana seperti 40 tahun yang lalu. Melainkan juga menyangkut soal tata pemerintahan, hukum, dan keamanan. Hal ini menjadi babak baru yang menandai kerjasama antara USAID dan Ethiopia dalam ranah yang lebih luas.

Dalam rencana pembangunan nasional lima tahunan GTP 2010-2015, USAID turut andil memberikan bantuan teknis dan finansial pada

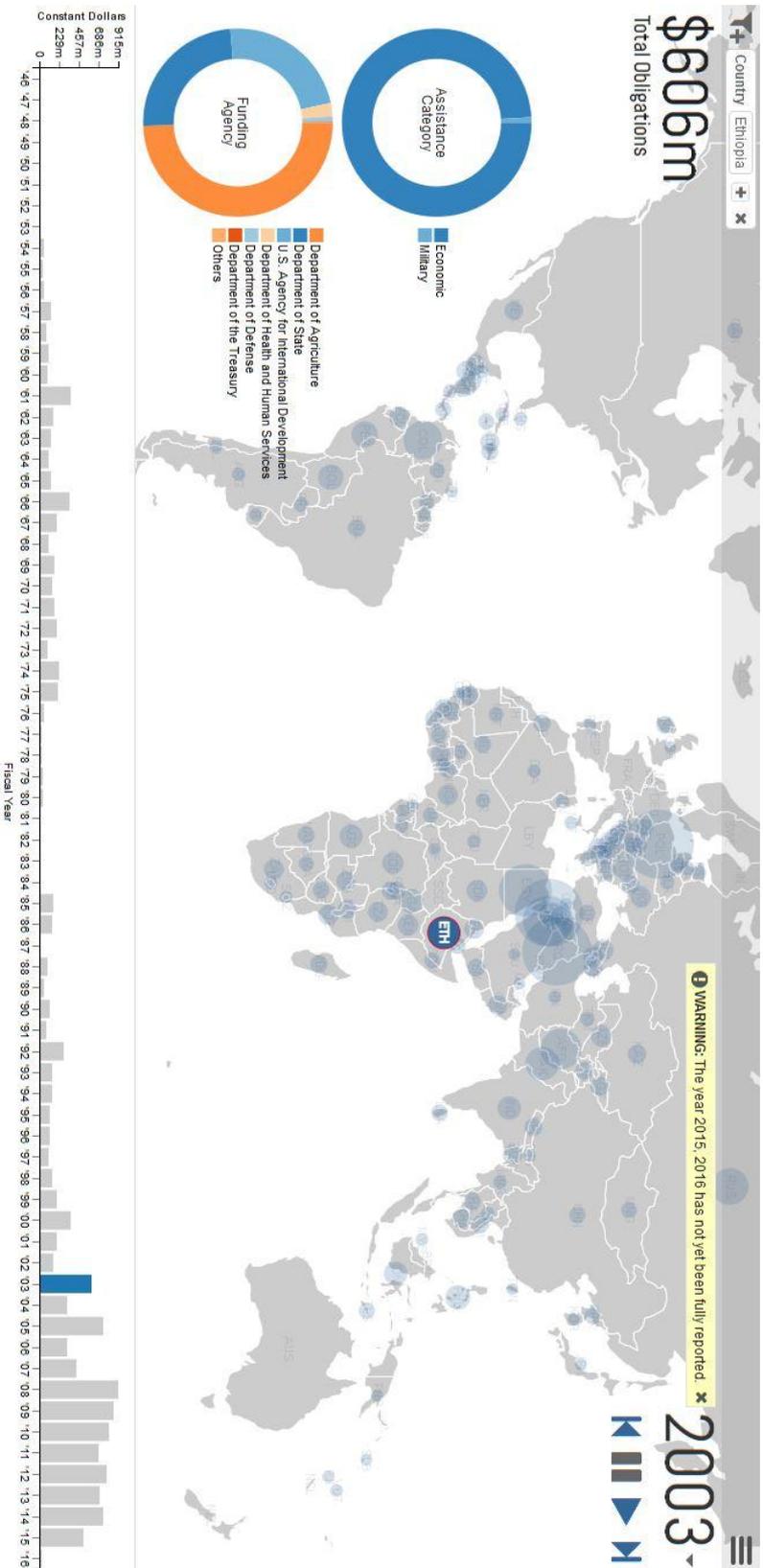
⁴⁶ Alex de Waal melaporkan kematian bencana kekeringan saat itu mencapai 400.000 jiwa. Lihat Alexander De Waal, *Evil Days: 30 Years of War and Famine in Ethiopia*, Vol. 3169, Issue 69 of Human rights documents: Africa, Human Rights Watch, New York, 1991, Hal.5.

⁴⁷ “*Foreign Aid Explorer Trends: Ethiopia*,” USAID, diakses dari <http://explorer.usaid.gov/aid-trends.html>, pada tanggal 1 Juni 2016.

Pemerintah Ethiopia. Kontribusi bantuan finansial USAID pada tahun 2010 mencapai 813,8 juta dolar AS, dimana bantuan tersebut mendominasi 35% bantuan yang masuk ke Ethiopia.⁴⁸ Dalam GTP 2010-2015 ini, Pemerintah Ethiopia berupaya melakukan modernisasi pertanian dalam skala masif guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui penguatan sektor pertanian seraya menggapai pembangunan sosial untuk mengatasi bencana kelangkaan pangan, kelaparan, dan masalah kemiskinan. Strategi utama Pemerintah Ethiopia untuk menggapai tujuan itu adalah dengan mencanangkan program *Villagization* atau dengan melakukan relokasi 1,5 juta penduduk dari wilayah yang ditargetkan untuk industri perkebunan ke pemukiman baru.⁴⁹ Strategi itu telah menjadi program yang dijalankan Pemerintah Ethiopia pada pertengahan tahun 2010 lalu.

⁴⁸ Oakland Institute, *op.cit.*, hal.12.

⁴⁹ *Ibid.*, hal.4.



Gambar 3. Tren bantuan USAID di Ethiopia

Sumber: explorer.usaid.gov/aid-trends.html (Diakses pada 1 Juni 2016)

D. Kontradiksi Laporan *Human Rights Watch*

USAID dan Pemerintah Ethiopia memiliki tujuan yang sama dalam mengatasi masalah kemiskinan dan kelaparan melalui pembangunan sosial. Oleh karena itu kedua lembaga ini bekerjasama mewujudkan tujuannya melalui program *Villagization* yang diimplementasikan mulai tahun 2010 hingga 2014. Pasca *Villagization* selesai, pemerintah Ethiopia menyatakan bahwa proses relokasi berjalan dengan lancar dan damai, serta telah memberikan dampak positif pada penduduk yang direlokasi.⁵⁰

Akan tetapi, banyak muncul kontroversi terkait bagaimana program *Villagization* ini diimplementasikan oleh Pemerintah Ethiopia. Seperti yang disebutkan *Human Rights Watch* (HRW) dalam laporan “*Waiting Here for Death*,” program *Villagization* yang terjadi di wilayah Gambella sarat akan pelanggaran HAM terhadap penduduk yang direlokasi. HRW mendapati wawancara dengan penduduk yang terdampak relokasi bahwa proses relokasi itu jauh dari kesukarelaan penduduk. Bahkan di beberapa pemukiman terpusat, penduduk yang direlokasi harus membangun rumah-rumahnya sendiri. Selain itu Pemerintah Ethiopia secara serampangan juga merelokasi penduduk adat (seperti Anuak dan Nuer) tanpa menghormati latar belakang adat dan budayanya. Sehingga mengakibatkan penduduk yang direlokasi itu terancam kehidupannya karena kehilangan mata pencaharian.⁵¹

⁵⁰ “*Villagization Program Bearing Fruit, says Addisu*,” Walta Info, diakses dari <http://www.waltainfo.com/index.php/news/detail/10428>, pada tanggal 7 Juni 2016.

⁵¹ Human Rights Watch, *op.cit.*, hal.21-24.

Dalam laporan HRW disebutkan bahwa proses relokasi acap kali diwarnai dengan intimidasi dan represi. Penduduk-penduduk yang menolak relokasi pun banyak yang ditangkap dan dipenjara sewenang-wenang, bahkan selama relokasi juga terjadi pemukulan, pemerkosaan, dan tindak kekerasan seksual lainnya. Selain itu hak-hak penduduk terhadap pendidikan, makanan, dan hunian yang layak diabaikan.⁵² HRW juga melaporkan bahwa Pemerintah Ethiopia mengabaikan janjinya untuk menyediakan fasilitas sekolah, klinik kesehatan, saluran irigasi, pabrik penggilingan, lahan terbuka untuk bercocok tanam, dan bantuan pangan selama tujuh sampai delapan bulan setelah penduduk direlokasi. Sehingga kemudian banyak penduduk yang pergi meninggalkan pemukiman barunya, baik dengan menjadi pengungsi ataupun kembali ke rumah mereka.⁵³

Bukti-bukti yang dilaporkan HRW menunjukkan bahwa tujuan Pemerintah Ethiopia maupun USAID untuk mencapai pembangunan sosial nampaknya tidak tercapai melalui program *Villagization* ini.⁵⁴ Banyak terjadi kontradiksi terhadap proses penggapaian tujuan pembangunan sosial yang seharusnya dapat memberikan peluang bagi masyarakat untuk memperoleh hak dan kebutuhan yang paling mendasar terkait pangan,

⁵² *Ibid.*, hal.25.

⁵³ *Ibid.*, hal.25-27.

⁵⁴ Menurut Midgley, Pembangunan Sosial adalah proses perubahan sosial yang terencana yang didesain untuk mengangkat kesejahteraan penduduk secara menyeluruh, dengan menggabungkannya dengan proses pembangunan ekonomi yang dinamis. Tujuannya adalah kesejahteraan sosial bagi masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan sosial dan menciptakan kesempatan sosial. Lihat James Midgley, *Pembangunan Sosial: Perspektif Pembangunan Dalam Kesejahteraan Sosial (terj.)*, Depag RI, Jakarta, 2005, hal.21-41.

pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan tempat tinggal. Dimana peluang itu dapat mendorong tercapainya transformasi sosial-ekonomi supaya masyarakat dapat keluar dari jerat kemiskinan dan kelaparan. Sayangnya, peluang itu nampaknya tidak dapat dirasakan penduduk.